



# LAPORAN KINERJA 2022

Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan  
Umum



# PENGANTAR



Dengan mengusung semangat Abhinaya Upangga Wisesa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus melakukan langkah-langkah perbaikan layanan peradilan dalam mewujudkan perolehan predikat Wilayah Bersih Birokrasi Melayani. Mahkamah Agung ibarat satu pohon besar yang batang dan cabangnya adalah pengadilan-pengadilan di seluruh

Indonesia, batang dan cabang diharapkan dapat tumbuh subur dan berbunga sehingga wibawa dan keindahan pohon besar tersebut dapat dirasakan oleh penikmatnya. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya meningkatkan layanan peradilan umum dengan melakukan diskusi terbuka baik melalui teleconference (sapa pengadilan) maupun berupa kunjungan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi di pengadilan sehingga dapat mencari solusi bersama untuk menyusun strategi perbaikan atau tranfer knowledge sebagaimana pembinaan dan arahan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada acara Rapat Koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Jogjakarta pada tanggal 11 Desember 2022.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2022 yang akan disampaikan dalam laporan ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan layanan di lingkungan peradilan umum.

Adapun inovasi yang merupakan unggulan dalam upaya meningkatkan kinerja dan layanan peradilan umum adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan pengadilan tinggi untuk menilai tingkat kepatuhan pengisian data pada aplikasi SIPP dan kesiapan pengadilan tinggi dalam mengimplementasikan register elektronik.

2. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Aplikasi yang menyediakan informasi tentang data SIPP yang belum diisi secara lengkap dan dapat digunakan sebagai alat monitoring terhadap implementasi SIPP.
3. Aplikasi CAKRA (Capaian Kinerja) Tenaga Teknis, Adalah aplikasi yang merekam capaian kinerja bagi seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan umum.
4. BIS (BADILUM INFORMATION SYSTEM), Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk proses kepegawaian dan pengolahan data tenaga teknis di lingkungan peradilan umum yang inovatif, efektif dan akurat. Proses kepegawaian meliputi proses promosi dan mutasi pegawai (TPM), data dukung proses kenaikan pangkat, data dukung proses pensiun, pencetakan surat-surat keputusan.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan kerjasama dengan baik dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Jakarta, 30 Januari 2023  
**Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum**



**H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19680523 199212 1 002

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Berikut rincian capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2022:

<b>Sasaran Program/Kegiatan I</b>				
<b>Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis	550 Orang	566 Orang	102
2.	Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	1.695 Orang	2.079 Orang	123
Capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan I				112

<b>Sasaran Program/Kegiatan II</b>				
<b>Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	5 Pengadilan	-	-
2.	Presentase Berkas Perkara Perdata yang lengkap			
	- Kasasi	100%	-	-
	- Peninjauan Kembali	100%	-	-
Capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan II				-

<b>Sasaran Program/Kegiatan III</b>				
<b>Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi	5 Pengadilan	-	-
2.	Presentase Berkas Perkara Pidana yang lengkap			
	- Kasasi	100%	-	-
	- Peninjauan Kembali	100%	-	-
	- Grasi	100%	-	-
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan III				-

<b>Sasaran Program/Kegiatan IV</b>				
<b>Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Jumlah Dokumen Kebijakan Yang Disusun	3 Dokumen	5 Dokumen	167
2.	Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum	56 Orang	58 Orang	103
3.	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatk Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	43.739 Orang	53.122 Orang	121
4.	Jumlah Perkara yang disidangkan diluar gedung pengadilan	4.628 Perkara	1.059 Perkara	23
5.	Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	160 Perkara	166 Perkara	104
6.	Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	130.670 Perkara	132.730 Perkara	102
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan IV				103

<b>Sasaran Program/Kegiatan V</b>				
<b>Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Jumlah Dokumen Tata Kelola Internal di Lingkungan Ditjen Badilum	9 Dokumen	9 Dokumen	100
Capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan V				100
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan				105

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>1</b>
A. Visi dan Misi.....	1
B. Indikator Kinerja Utama .....	1
C. Rencana Strategis 2020-2024 .....	3
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	4
E. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	9
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	11
1. Sasaran Program/Kegiatan 1: Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.....	11
2. Sasaran Program/Kegiatan 2: Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali .....	18
3. Sasaran Program/Kegiatan 3: Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.....	19
4. Sasaran Program/Kegiatan 4: Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.....	19
5. Sasaran Program/Kegiatan 5: Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.....	36
C. Akuntabilitas Keuangan.....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>40</b>
Kesimpulan.....	40

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Sasaran Program/Kegiatan dan IKU Tahun 2022.....	8
Tabel 2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan I Tahun 2022.....	9
Tabel 3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan II Tahun 2022.....	9
Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan III Tahun 2022 .....	10
Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan IV Tahun 2022 .....	10
Tabel 6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan V Tahun 2022 .....	11
Tabel 7. Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 1 Tahun 2022.....	11
Tabel 8. Tabel Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Tahun 2022 .....	12
Tabel 9. Tabel Rincian Unsur Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Tahun 2022 .....	14
Tabel 10. Tabel Jumlah Promosi dan Mutasi Hakim Tahun 2022 .....	17
Tabel 11. Tabel Jumlah Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Tahun 2022 .....	17
Tabel 12. Tabel Jumlah Promosi dan Mutasi Hakim dan Kepaniteraan Tahun 2022 .....	17
Tabel 13. Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 4 Tahun 2022.....	20
Tabel 14. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan Umum .....	23
Tabel 15. Jumlah Posbakum tahun 2018 - 2022 .....	27
Tabel 16. Rincian Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2022.....	28
Tabel 17. Jumlah Layanan Sidang Di luar Gedung Pengadilan Tahun 2018-2022.....	29
Tabel 18. Jumlah Perkara Sidang Diluar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2022 .....	29
Tabel 19. Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 – 2022 .....	30
Tabel 20. Besaran Maksimal Pembebasan Biaya Perkara .....	31
Tabel 21. Jumlah Layanan Sidang Di luar Gedung Pengadilan Tahun 2018-2022.....	31
Tabel 22. Data Perkara Pengadilan Negeri Tahun 2022.....	33
Tabel 23. Keseluruhan Data Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Tahun 2022 .....	33
Tabel 24. Jumlah Perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Tahun 2022 .....	34
Tabel 25. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Pertama Tahun 2022 .....	34
Tabel 26. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Banding Tahun 2022 .....	35
Tabel 27. Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2018-2022.....	36
Tabel 28. Rincian Alokasi Anggaran pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum Tahun 2022 .....	38
Tabel 29. Perbandingan Presentase Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	39

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022.....7  
Grafik 2. Jumlah Tenaga Teknis (Hakim dan Panitera) yang mengikuti Pembinaan Teknis.. 16  
Grafik 3. Capaian Perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahun 2016-2021 .....36

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Sebagai penyelenggara negara yang baik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan asas penyelenggaraan good governance berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022. Selain untuk memenuhi Akuntabilitas, Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah salah satu unit eselon I yang ada di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI.

## 2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

## C. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) masih sama dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, tugas pokok dan fungsi dan Struktur Organisasi;

- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahun 2022 serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2020-2024 yang bermuara pada menjaga kemandirian badan peradilan umum, memberikan dukungan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan umum, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi yang telah direview sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

### A. Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai Visi:

**“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”**

dengan Misi sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum;
- b. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum.

### B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan telah direview dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3
1.		a. Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3
	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	b. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali b. Presentase Berkas Perkara Perdata yang Lengkap: - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi b. Presentase Berkas Perkara Pidana yang Lengkap: - Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen Kebijakan yang disusun b. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang mengikuti Bimbingan Teknis dibidang Administrasi Peradilan Umum c. Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan d. Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan e. Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara f. Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen Tata Kelola Internal di Lingkungan Ditjen Badilum

### C. Rencana Strategis 2020-2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi tahun ke dua dari Rencana Srategis tahun 2020 – 2024 dengan sasaran strategis yang dituangkan dan disusun kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara pimpinan unit eselon II kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di awal tahun anggaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 adapun indikator dari perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis
- b. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi
- c. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali
- d. Presentase Berkas Perkara Peradata Lengkap
- e. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi
- f. Presentase Berkas Perkara Pidana Lengkap
- g. Jumlah Dokumen Kebijakan Yang Disusun
- h. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang mengikuti Bimbingan Teknis dibidang Administrasi Peradilan Umum
- i. Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatk Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan
- j. Jumlah Perkara disidangkan di luar gedung pengadilan
- k. Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
- l. Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu
- m. Jumlah Dokumen Tata Kelola Internal di Lingkungan Ditjen Badilum

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat didalam Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 dan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk kemudian dituangkan dan disusun kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis	550 Orang
		b. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	1.695 Orang
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	5 Pengadilan
		b. Presentase Berkas Perkara Perdata yang Lengkap	
		- Kasasi	100%
		- Peninjauan Kembali	100%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan	5 Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Berkas Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi	
		b. Presentase Berkas Perkara Pidana yang Lengkap	
		- Kasasi	100%
		- Peninjauan Kembali	100%
		- Grasi	100%
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen kebijakan Yang disusun	3 Dokumen
		b. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum	56 Orang
		c. Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	43.739 Orang
		d. Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	4.628 Orang
		e. Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	160 Perkara
		f. Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	130.670 Perkara
		g. Presentase Perkara yang diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2%
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen Tata Kelola Internal di Lingkungan Ditjen Badilum	9 Dokumen

**E. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, dapat mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dimana setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur dengan rumusan sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022



Grafik 1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022

**Tujuan : Meningkatkan Kualitas Badan Peradilan Umum Yang Mandiri, Kredibel, dan Transparan**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2
Sasaran Program/Kegiatan 1: Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis</li> <li>- Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi</li> </ul>
Sasaran Program/Kegiatan 2: Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali</li> <li>- Presentase Berkas Perkara Perdata Lengkap               <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kasasi</li> <li>-Peninjauan Kembali</li> </ul> </li> </ul>
Sasaran Program/Kegiatan 3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi</li> <li>- Presentase Berkas Perkara Pidana Lengkap               <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kasasi</li> <li>-Peninjauan Kembali</li> <li>-Grasi</li> </ul> </li> </ul>
Sasaran Program/Kegiatan 4 : Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Kebijakan Yang Disusun</li> <li>- Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum</li> <li>- Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatk Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan</li> <li>- Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan</li> <li>- Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara</li> <li>- Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu</li> </ul>
Sasaran Program/Kegiatan 5 Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Tata Kelola Internal di Lingkungan Ditjen Badilum</li> </ul>

*Tabel 1. Sasaran Program/Kegiatan dan IKU Tahun 2022*

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian sasaran, sesuai dengan indikator kinerja masing-masing. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 dilakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan sasaran maupun target indikator kinerja yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon II.

Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Program/Kegiatan I				
Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis	550 Orang	566 Orang	102
2.	Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	1.695 Orang	2.079 Orang	123

*Tabel 2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan I Tahun 2022*

Sasaran Program/Kegiatan II				
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	5 Pengadilan	-	-
2.	Presentase Berkas Perkara Perdata Lengkap			
3.	- Kasasi	100%	-	-
4.	- Peninjauan Kembali	100%	-	-

*Tabel 3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan II Tahun 2022*

Sasaran Program/Kegiatan III				
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	5 Pengadilan	-	-
2.	Presentase Berkas Perkara Pidana Lengkap			
3.	- Kasasi	100%	-	-
4.	- Peninjauan Kembali	100%	-	-
5.	- Grasi	100%	-	-

Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan III Tahun 2022

Sasaran Program/Kegiatan IV				
Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun	3 Kebijakan	5 Kebijakan	167
2.	Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum	56 Orang	58 Orang	103
3.	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	43.739 Orang	53.122 Orang	121
4.	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	4.628 Perkara	1.059 Perkara	22
5.	Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	160 Perkara	166 Perkara	103
6.	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	130.670 Perkara	132.730 Perkara	102

Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan IV Tahun 2022

Sasaran Program/Kegiatan V				
Peningkatan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	9 Dokumen	9 Dokumen	100

Tabel 6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan V Tahun 2022

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Program/Kegiatan 1: Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah:

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)				
				2022	2021	2020	2019	2018
1.	Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis	550 Orang	566 Orang	102	151	55	118	74
2.	Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	1.695 Orang	2.079 Orang	123	183	286	100	100

Tabel 7. Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 1 Tahun 2022

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

#### a. Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan percepatan penyelesaian perkara pada pengadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan pembinaan kepada tenaga teknis baik hakim, panitera maupun jurusita. Tahun 2022 jumlah tenaga teknis yang terdiri dari 4.485 orang Hakim dan 6.487 orang Kepaniteraan (Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita). Target tenaga teknis yang mengikuti pembinaan teknis sebanyak 550 orang. Pembinaan teknis yang dilaksanakan meliputi: Focus Group Discussion (FGD) Kepaniteraan (Jurusita),

Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan, Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif, Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pengadilan, Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Niaga. Lebih lanjut rincian tenaga teknis yang mengikuti peningkatan kualitas tenaga teknis dalam rangka melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Pembinaan	Jumlah Peserta (Orang)
1	FGD Peningkatan Mutu Kepaniteraan / Jurusita (Wilayah Hukum PT Tanjung Karang dan PT Palembang)	50
2	FGD Peningkatan Mutu Kepaniteraan / Jurusita (Wilayah Hukum PT Yogyakarta)	32
3	Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan (Wilayah Hukum PT Sulawesi Utara)	40
4	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Jakarta dan Banten)	92
5	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Maluku Utara)	56
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Medan)	112
7	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Mataram)	90
8	Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan (Wilayah Hukum PT Bengkulu)	50
9	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual HKI/Niaga	44
<b>Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis</b>		<b>566</b>

Tabel 8. Tabel Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Tahun 2022

Rincian unsur peserta kegiatan peningkatan kualitas tenaga teknis sebagai berikut:

No	Jenis Pembinaan	Peserta
1	FGD Peningkatan Mutu Kepaniteraan / Jurusita (Wilayah Hukum PT Tanjung Karang dan PT Palembang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 46 Orang Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan PT Palembang</li> <li>- 2 Orang dari Biro Hukum Pemda Palembang</li> <li>- 2 Orang dari Polresta Palembang</li> </ul>
2	FGD Peningkatan Mutu Kepaniteraan / Jurusita (Wilayah Hukum PT Yogyakarta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 28 Orang Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta</li> <li>- 2 Orang dari Biro Hukum Pemprov D.I. Yogyakarta</li> <li>- 2 Orang dari Polresta Yogyakarta</li> </ul>
3	Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan (Wilayah Hukum PT Sulawesi Utara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 36 Orang Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara</li> <li>- 2 Orang dari Biro Hukum Pemda Manado</li> <li>- 2 Orang dari Polresta Manado</li> </ul>
4	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Jakrta dan Banten)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 88 Orang Tenaga Teknis (Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panmud) Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dan Banten</li> <li>- 2 Orang dari Kejaksaan Tangerang</li> <li>- 2 Orang dari Polresta Tangerang</li> </ul>
5	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 52 Orang Tenaga Teknis (Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panmud)</li> </ul>

	Restoratif (Wilayah Hukum PT Maluku Utara)	<p>Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Orang dari Kejaksaan Ternate</li> <li>- 2 Orang dari Polresta Ternate</li> </ul>
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Medan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 108 Orang Tenaga Teknis (Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panmud) Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan</li> <li>- 2 Orang dari Kejaksaan Medan</li> <li>- 2 Orang dari Polresta Medan</li> </ul>
7	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Mataram)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 86 Orang Tenaga Teknis (Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panmud) Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Mataram</li> <li>- 2 Orang dari Kejaksaan Mataram</li> <li>- 2 Orang dari Polresta Mataram</li> </ul>
8	Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan (Wilayah Hukum PT Bengkulu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 46 Orang Tenaga Teknis (Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim,) Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan</li> <li>- 2 Orang dari Kejaksaan Medan</li> <li>- 2 Orang dari Polresta Medan</li> </ul>
9	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual HKI/Niaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 44 Orang Tenaga Teknis (Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim yang menangani perkara niagai) dari Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Makassar</li> </ul>

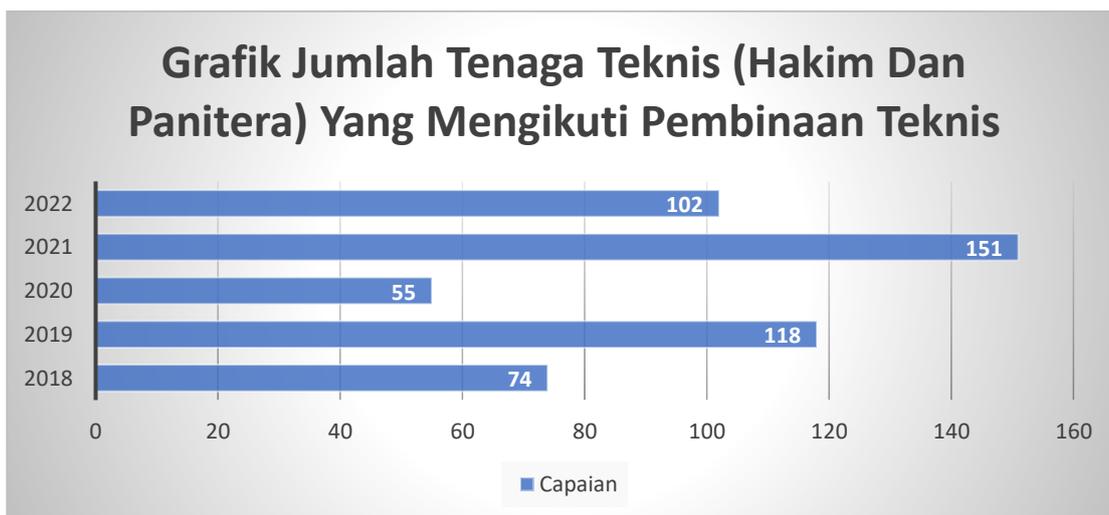
Tabel 9. Tabel Rincian Unsur Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Tahun 2022

Realisasi tenaga teknis yang mengikuti pembinaan teknis tahun 2022 yaitu 566 orang dengan capaian sebesar 102,92% (103%).





Secara keseluruhan grafik jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang mengikuti pembinaan di lingkungan Peradilan Umum sebagai berikut:



*Grafik 2. Jumlah Tenaga Teknis (Hakim dan Panitera) yang mengikuti Pembinaan Teknis*

**b. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan promosi / mutasi Hakim dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim PN	929
2	Hakim PT	167
3	Hakim Ad Hoc	82
<b>Jumlah</b>		<b>1178</b>

Tabel 10. Tabel Jumlah Promosi dan Mutasi Hakim Tahun 2022

Sedangkan promosi / mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tahun 2022 ditampilkan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

No	Jabatan	PT	PN	Jumlah
1	Panitera	10	163	173
2	Panitera Muda	51	512	563
3	Mutasi Panitera Pengganti	62	234	296
4	Pengangkatan Panitera Pengganti	46	101	147
5	Mutasi Jurusita	0	13	13
6	Pengangkatan Jurusita	0	158	158
7	Lepas Jabatan Padmud	0	0	0
8	Lepas Jabatan PP	0	6	6
9	Lepas Jabatan JS	0	2	2
<b>Jumat</b>		<b>169</b>	<b>1189</b>	<b>1358</b>

Tabel 11. Tabel Jumlah Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa keseluruhan tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang promosi dan mutasi tahun 2022 sebanyak 2.546 orang, dengan perincian yang dibiayai oleh negara sebagai berikut:

No	Jabatan	Promosi dan Mutasi di biayai Negara
1	Hakim	1463
2	Kepaniteraan	616
<b>Jumlah</b>		<b>2079</b>

Tabel 12. Tabel Jumlah Promosi dan Mutasi Hakim dan Kepaniteraan Tahun 2022

Jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang promosi dan mutasi ditargetkan sebanyak 1.695 orang, realisasi sebanyak 2.079 orang. Sehingga, capaian kinerja indikator jumlah tenaga teknis yang promosi dan mutasi adalah sebesar 122,65% (123%) dengan catatan bahwa sebagian tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang anggaran mutasinya dibayarkan pada tahun berikutnya. Adapun untuk 467 orang tenaga teknis (Hakim dan Panitera) dilakukan pola promosi dan mutasi: *pertama*, pada promosi dan mutasi hakim mengacu kepada SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan yaitu Mutasi Untuk Kepentingan Pribadi; *kedua*, pada mutasi kepaniteraan SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Umum yaitu promosi dan mutasi yang diberikan pengecualian syarat-syaratnya berdasarkan alasan khusus untuk kepentingan lembaga.

## **2. Sasaran Program/Kegiatan 2: Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung tanggal 27 November 2019 disebutkan bahwa kewenangan penelaahan berkas perkara pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung kepada Panitera Muda Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung. Penerimaan kelengkapan berkas perkara yang semula diterima di Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi dilimpahkan kepada Bagian Tata Usaha

Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 penilaian capaian kinerja pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perdata dalam hal menerima, mengelola administrasi perkara perdata yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung menjadi kewenangan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Namun, meskipun telah adanya pelimpahan wewenang dan menjadi kewenangan Kepaniteraan Mahkamah Agung struktur organisasi tata kerja Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum masih terdapat unit eselon 2 tersebut. Sehingga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus mendorong agar segera dilakukan Restrukturisasi Organisasi pada Mahkamah Agung khususnya struktur organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

**3. Sasaran Program/Kegiatan 3: Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung tanggal 27 November 2019 disebutkan bahwa kewenangan penelaahan berkas perkara pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung kepada Panitera Muda Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung. Penerimaan kelengkapan berkas perkara yang semula diterima di Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi dilimpahkan kepada Bagian Tata Usaha

Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 penilaian capaian kinerja pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perdata dalam hal menerima, mengelola administrasi perkara perdata yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung menjadi kewenangan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Namun, meskipun telah adanya pelimpahan wewenang dan menjadi kewenangan Kepaniteraan Mahkamah Agung struktur organisasi tata kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum masih terdapat unit eselon 2 tersebut. Sehingga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus mendorong agar segera dilakukan Restrukturisasi Organisasi pada Mahkamah Agung khususnya struktur organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

**4. Sasaran Program/Kegiatan 4: Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.**

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah:

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)				
				2022	2021	2020	2019	2018
1.	Jumlah Dokumen Kebijakan Yang Disusun	3 Dokumen	5 Dokumen	167	160	180	100	100
2.	Jumlah Tenaga Teknis Yang mengikuti Bimbingan Teknis dibidang Administrasi Peradilan Umum	56 Orang	58 Orang	104	1870	205	90	93
3.	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	43.739 Orang	53.122 Orang	121	100	100	100	100
4.	Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	4.628 Perkara	1.059 Perkara	23	44	82	100	100
5.	Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	160 Perkara	166 Perkara	104	53	26	29	100
6.	Jumlah Perkara Peradilan di tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	130.670 Perkara	132.730 Perkara	102	90	206	99	99

Tabel 13. Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 4 Tahun 2022

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**a. Jumlah Dokumen Kebijakan Yang Disusun**

Jumlah Dokumen Kebijakan Yang Disusun meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Yang disusun antara lain:
  - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2478/DJU/SK/HK.00.01/12/2022 tentang Standar Penomoran Perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
  - b. Intruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum
  - c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022 tentang Pembaruan Cheklist Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
  - d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di bawahnya;
  - e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 14/DJU/SK/HM.02.3/1/2022 tentang Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
  - f. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO) yang disusun dengan tujuan untuk menyeragamkan pemahaman bagi Pengadilan dalam memberikan layanan hukum pembebasan biaya perkara.

2. Evaluasi Standar Operasional Prosedur Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
3. Impelemntasi Sidang diluar Gedung Pengadilan/E-Register/Pelayanan Hukum Disabilitas antara lain:
  - a. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1490/DJU/HM.02.3/12/2022 tentang Penerapan Register Elektronik Pada Pengadilan Negeri;
  - b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2441/DJU/SK/PS.00/10/2022 tentang Pemberlakuan Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum;
  - c. Buku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas yang disusun bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman bagi pengadilan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat dengan kebutuhan khusus.
4. Buku Pedoman SPPT-TI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun bertujuan agar pengadilan dapat mengetahui desain dan proses bisnis pelaksanaan SPPT-TI pada pengadilan serta mengetahui tata cara pemanfaatan SPPT-TI dalam Penyelesaian Perkara Pidana secara elektronik;
5. Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri yang disusun dengan tujuan agar pengadilan mengetahui tata cara operasional aplikasi SIPP serta mengetahui fitur-fitur yang ada di aplikasi SIPP.

Realisasi Jumlah Dokumen Kebijakan Yang Disusun sebanyak 5 dokumen dengan capaian 166,67% (167%). Dalam rangka mendukung layanan peradilan dokumen

kebijakan yang disusun dimungkinkan bertambah menyesuaikan perkembangan kebutuhan layanan peradilan.

- b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum**  
Tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan peningkatan kompetensi di bidang administrasi peradilan umum berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan di pengadilan dengan peserta dari tenaga teknis hakim, panitera, dan jurusita. Bimbingan teknis yang diberikan antara lain bimbingan teknis pelayanan hukum disabilitas dan bimbingan teknis biaya perkara pengadilan. Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Bimbingan/Pembinaan	Jumlah Peserta (Orang)
1	Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas di Singaraja	13
2	Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas di Pekanbaru	17
3	Bimbingan Teknis Biaya Perkara Pengadilan	28
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>

*Tabel 14. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan Umum*

- a) Maksud dan tujuan kegiatan bimbingan teknis pelayanan hukum disabilitas adalah:
- Terwujudnya pelayanan prima terutama bagi pencari keadilan dari kaum disabilitas;
  - Meningkatkan fasilitas untuk pengguna layanan penyandang disabilitas;
  - Untuk keseragaman pemahaman mengenai pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan;

- Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib dan sebaik-baiknya;
  - Meningkatkan sistem pelayanan publik dalam memperoleh keadilan terutama pencari keadilan dari kaum disabilitas;
  - Pendalaman materi untuk dapat menambah wawasan para peserta tentang sarana dan prasarana yang diperlukan di Pengadilan dalam melayani pencari keadilan dari kaum disabilitas.
  - Mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk mengupayakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik pelayanan fisik dan pelayanan nonfisik.
- b) Maksud dan tujuan bimbingan teknis biaya perkara pengadilan yang dilaksanakan adalah:
- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
  - Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
  - Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
  - Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian keuangan perkara;
  - Pendalaman materi mengenai keuangan perkara di pengadilan;
  - Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang terkait dengan keuangan perkara terutama masalah temuan BPK dan cara pengisian aplikasi Komdanas.





Kegiatan dilaksanakan di 6 Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Tabanan, Pengadilan Negeri Negara, Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Tinggi

Bajarmasin, Pengadilan Negeri Pangkajene, Pengadilan Negeri Maros dan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 28 orang. Sehingga realisasi Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten Di Bidang Administrasi Peradilan Umum sebanyak 58 Orang dengan capaian sebesar 103,57% (104%).

**c. Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan**

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Tahun	Jumlah Posbakum (satker)	Jumlah Penerima Layanan (Orang)
2018	352	10.019
2019	382	18.564
2020	382	42.497
2021	382	47.930
2022	382	53.122

*Tabel 15. Jumlah Posbakum tahun 2018 - 2022*

Pelayanan yang diberikan pada Posbakum antara lain pemberian informasi Organisasi Bantuan Hukum, pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat/pencari keadilan dan penyediaan informasi. Berdasarkan jumlah satuan kerja dimana masyarakat/pencari keadilan merasakan manfaat dari layanan pos bantuan hukum, layanan ini tersedia di 382 pengadilan negeri. Pos bantuan hukum pada tahun 2022 pengadilan telah memberikan layanan kepada 53.122 orang dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Laki-Laki		Perempuan	
	Difabel	Non-Difabel	Difabel	Non-Difabel
<b>Januari</b>	62	2213	14	1759
<b>Februari</b>	22	2090	23	1741
<b>Maret</b>	39	2621	41	2149
<b>April</b>	25	2528	23	1808
<b>Mei</b>	27	2294	17	1642
<b>Juni</b>	24	2955	36	2334
<b>Juli</b>	33	2976	42	2223
<b>Agustus</b>	23	2632	39	1973
<b>September</b>	25	2890	10	2236
<b>Oktober</b>	37	2502	25	2040
<b>November</b>	8	1810	10	1347
<b>Desember</b>	1	2075	3	1675
<b>Jumlah</b>	<b>326</b>	<b>29586</b>	<b>283</b>	<b>22927</b>
	<b>53122</b>			

Tabel 16. Rincian Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2022

Alokasi anggaran Posbakum tahun 2022 sebesar Rp. 11.136.800.000,- (sebelas milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.603.795.917,- (sepuluh milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau 95,21%. Target jumlah orang yang mendapat layanan Posbakum Pada Pengadilan sebanyak 43.739 orang dengan realisasi sebanyak 53.122 orang atau 121,42% (121%). Kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini meningkat sebesar 10,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**d. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan**

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan

melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan

Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
2018	97	378
2019	64	3.290
2020	57	3.190
2021	76	2.038
2022	169	1.059

Tabel 17. Jumlah Layanan Sidang Di luar Gedung Pengadilan Tahun 2018-2022

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2022 sebanyak 1.059 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
1	Januari	37
2	Februari	93
3	Maret	257
4	April	24
5	Mei	39
6	Juni	106
7	Juli	101
8	Agustus	63
9	September	115
10	Oktober	102
11	November	98
12	Desember	24
<b>Jumlah</b>		<b>1059</b>

Tabel 18. Jumlah Perkara Sidang Diluar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2022

Alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan tahun 2022 sebesar Rp. 6.317.295.000,- (enam milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.274.997.197,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 99,33%. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan tahun 2022 sebanyak 1.059 perkara atau 22,88% (23%) dari target yang telah ditetapkan. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini menurun sebesar 48,03% (48%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

*e. Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara*

Tahun	Jumlah Layanan (Perkara)
2018	1.501
2019	1.424
2020	2.068
2021	2.130
2022	1.778

*Tabel 19. Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 – 2022*

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di

Pengadilan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara, meliputi biaya perkara:

No.	Jenis Perkara	Besaran Maksimal Pembebasan Biaya Perkara (Rp)
1	Perdata Permohonan	Rp. 187.000,00
2	Perdata Gugatan	Rp. 2.185.000,00
3	Banding	Rp. 897.000,00
4	Kasasi	Rp. 1.137.000,00
5	Peninjauan Kembali	Rp. 2.137.000,00
6	Permohonan Eksekusi (hanya untuk panjar Biaya Eksekusi)	Rp. 1.077.000,00

Tabel 20. Besaran Maksimal Pembebasan Biaya Perkara

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara (prodeo) sebanyak 1.778 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Jenis		Jenis Perkara					
	DIPA	Murni	Pdt.G	Pdt.GS	Kepailitan	PHI	Pdt.Bth	PdtP
Januari	87	41	4	0	3	121	0	0
Februari	70	26	9	0	1	83	0	3
Maret	41	20	5	0	2	49	0	5
April	99	109	2	0	0	201	0	5
Mei	88	39	5	0	0	117	0	5
Juni	227	94	11	0	0	297	0	13
Juli	106	63	7	0	0	158	0	4
Agustus	105	105	8	0	0	189	0	13
September	92	29	6	0	0	104	0	11
Oktober	97	34	15	0	0	104	0	12
November	65	20	3	1	0	78	0	3
Desember	92	29	6	0	0	104	0	11
Jumlah	1169	609	81	1	6	1605	0	85
	1778		1778					

Tabel 21. Jumlah Layanan Sidang Di luar Gedung Pengadilan Tahun 2018-2022

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara tahun 2022 sebanyak 166 perkara dengan target perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara sebanyak 160 perkara dengan alokasi anggaran yang disediakan kepada 37 satker pengadilan sebesar Rp. 106.350.000,- (untuk perkara permohonan dan gugatan) sehingga capaian indikator ini sebesar 103,75% (104%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.987.200,- atau 31,95%. Realisasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara lebih besar dari realisasi anggaran yang terserap karena pembiayaan perkara permohonan lebih ringan dibandingkan dengan biaya perkara gugatan.

Sedangkan, alokasi anggaran PHI sebesar Rp. 2.197.115.000 dan target jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara PHI sebanyak 1.758 dengan realisasi sebanyak 1.605 perkara.

***f. Jumlah Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu***

Jangka waktu penyelesaian perkara ditingkat pertama dan ditingkat banding sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat 5 bulan dan jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat 3 bulan.

## 1. Data Perkara Pada Pengadilan Negeri

## a. Data Perkara pada Pengadilan Negeri:

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus	Realisasi (%)
Gugatan	12925	39335	52260	37550	71.85
Permohonan	477	5980	60277	58192	96.54
Gugatan Sederhana	557	6875	7432	6461	86.93
Perlawanan/Bantahan	384	1090	1474	905	61.40
Kepailitan	28	105	133	104	78.20
PKPU	97	823	920	700	76.09
HAKI	51	122	173	149	86.13
PHI	740	2408	3148	2466	78.34
Pidana Biasa	20077	119109	139186	118047	84.81
Pidana Singkat	25	100	125	105	84.00
Pidana Cepat	115	16354	16469	16353	99.30
Pidana Anak	800	4972	5772	4947	85.71
Perikanan	5	36	41	36	87.80
Tipikor	861	2041	2902	1925	66.33
Prapradilan	124	1374	1498	1271	84.85
Lalulintas	-	2590903	2590903	2590903	100.00
<b>Total</b>	<b>37266</b>	<b>2791627</b>	<b>2882713</b>	<b>2840114</b>	<b>98.52</b>

Tabel 22. Data Perkara Pengadilan Negeri Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus Tepat Waktu	Realisasi (%)
Perdata	15259	110558	125817	102354	81.35
Pidana	22007	139367	161374	142430	88.26
<b>Jumlah</b>	<b>37266</b>	<b>249925</b>	<b>287191</b>	<b>244784</b>	<b>85.23</b>

Tabel 23. Keseluruhan Data Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Tahun 2022

Pada tabel 23 jumlah beban perkara sebanyak 287.191 perkara (tidak termasuk perkara lalu lintas) dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu ditingkat pertama (5 bulan, kecuali Gugatan Sederhana 25 hari dan prapradilan 7 hari) sebanyak 244.784 perkara sebesar 85,23% (85%).

i. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada Pengadilan Tinggi

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus (< 3 Bulan)	Realisasi (%)
Perkara Perdata	1055	7709	8764	7198	82.13
Perkara Pidana	1146	11998	13144	10973	83.48
<b>Total</b>	<b>2201</b>	<b>19707</b>	<b>21908</b>	<b>18171</b>	<b>82.94</b>

Tabel 24. Jumlah Perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Tahun 2022

Pada tabel 24. jumlah beban perkara pengadilan tinggi pada tahun 2022 sebanyak 21.908 perkara, yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 18.171 perkara. Presentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 82,94% (83%).

b) Data Perkara Berdasarkan Jenis Perkara yang di Biayai oleh DIPA

i. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Ditingkat Pertama (Berdasarkan Jenis Perkara Yang Di Biayai Oleh DIPA)

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus (<5 Bulan)	Realisasi (%)
Pidana Biasa	20077	119109	139186	117868	84.68
Tipikor	861	2041	2902	1853	63.85
PHI	740	2408	3148	2454	77.95
<b>Total</b>	<b>21678</b>	<b>123558</b>	<b>145236</b>	<b>122175</b>	<b>84.12</b>

Tabel 25. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Pertama Tahun 2022

Jumlah Beban Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022 sebanyak 145.236 Perkara (pidana biasa, tipikor dan PHI), Realisasi Jumlah Perkara Yang

Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Pertama sebanyak 122.175 atau 84,12% (84%).

- ii. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Ditingkat Banding (Berdasarkan Jenis Perkara Yang Di Biayai Oleh DIPA)

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus (< 3 Bulan)	Realisasi (%)
<b>Pidana Biasa</b>	1146	11998	13144	9791	74.49
<b>Tipikor</b>	0	764	764	764	100
<b>Total</b>	<b>1146</b>	<b>12762</b>	<b>13908</b>	<b>10555</b>	<b>75.89</b>

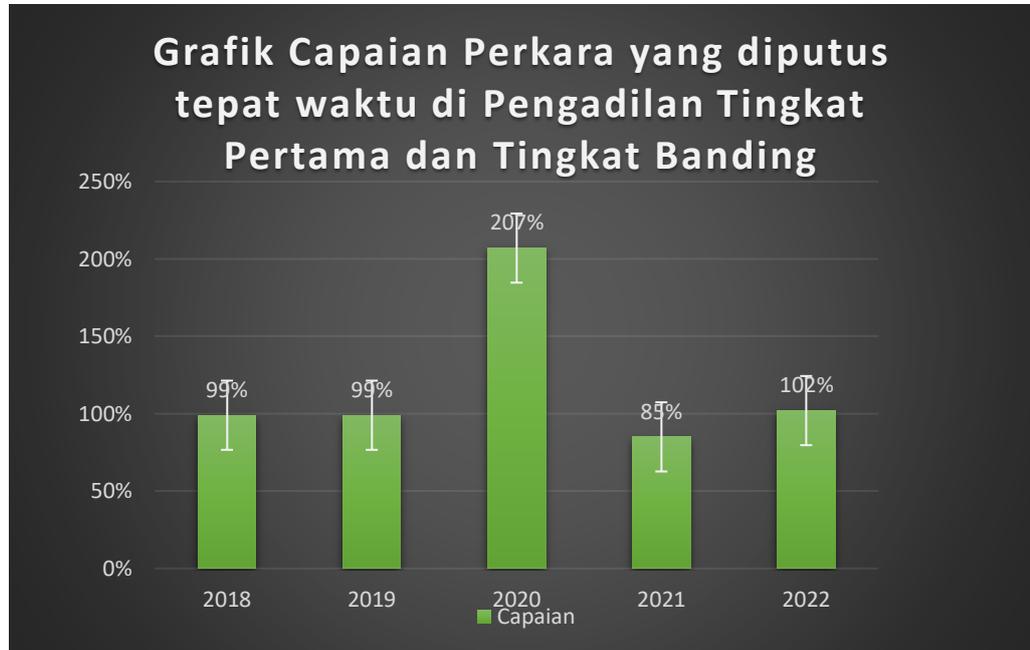
*Tabel 26. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Banding Tahun 2022*

Jumlah Beban Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022 sebanyak 13.908 Perkara, Realisasi Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Banding sebanyak 10.555 Perkara atau 75,89% (76%).

Secara keseluruhan jumlah beban perkara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pada tahun 2022 sebanyak 275.163 perkara dan perkara lalu lintas sebanyak 2.590.903 perkara. Keseluruhan perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebanyak 263.044 perkara dan jumlah perkara lalu lintas sebanyak 2.590.903 perkara. sehingga persentase penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 95,59% (96%).

Target jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu di tingkat pertama dan tingkat banding sebanyak 130.670 Perkara. Realiasi dihitung berdasarkan pada perkara yang diselesaikan dengan di biayai oleh DIPA, dengan jumlah perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebanyak 132.730 Perkara atau 101,57% (102%). Terdapat perbedaan jumlah perkara pada laporan ini dengan jumlah perkara pada laporan di Mahkamah Agung karena adanya perbedaan waktu penarikan data.

Capaian kinerja indikator Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tahun-tahun sebelumnya yaitu:



Grafik 3. Capaian Perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahun 2016-2021

**5. Sasaran Program/Kegiatan 5: Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum**

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah:

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)				
				2022	2021	2020	2019	2018
1.	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	9 Dokumen	9 Dokumen	100	100	100	100	100

Tabel 27. Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2018-2022

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**a. Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disusun sasaran untuk peningkatan manajemen pelayanan di

lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upaya ini dijabarkan menjadi penyusunan dokumen tata kelola (laporan) yang mendukung antara lain penyusunan perencanaan program dan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan Keuangan melalui akuntabilitas Akuntansi / Laporan Keuangan, pengelolaan Aset Barang Milik Negara dengan akuntabilitas Laporan Barang Milik Negara (BMN), pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi melalui penyusunan Laporan Kinerja, penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Tahunan sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Penyampaian laporan yang tepat waktu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Indikator ini mengukur persentase dari jumlah penyusunan dokumen tata kelola (laporan) yang dihasilkan dengan jumlah dokumen tata kelola (laporan) yang ditargetkan tahun 2022. Persentase realisasi dan capaian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar 100%. Total jumlah dokumen tata kelola yang dihasilkan adalah sebanyak 9 laporan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi dan capaian yang dihasilkan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini disebabkan seluruh dokumen tata kelola (laporan) telah disampaikan tepat waktu.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Berikut rincian realisasi anggaran dan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan:

1. Pagu Tahun 2022 adalah sebesar Rp.58.886.062.000,- (lima puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
  - Belanja pegawai           Rp. 9.370.644.000, -
  - Belanja barang/jasa       Rp. 48.388.073.000, -
  - Belanja modal             Rp. 1.127.345.000, -
2. Realisasi anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 58.431.664.237,- (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 99,23% (99%) dari pagu anggaran dengan rincian:

- Belanja pegawai Rp. 9.304.478.331,- (99,29%)
  - Belanja barang/jasa Rp. 48.029.714.806,- (99,26%)
  - Belanja modal Rp. 1.097.471.100,- (97,35%)
3. Jumlah DIPA yang dilaksanakan oleh Satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 81.561.496.000,- (delapan puluh satu milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.182.444.873,- (Tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 97.26% (87%).
4. Rincian alokasi anggaran per kegiatan pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

Kode/Program/Kegiatan		Pagu Anggaran
<b>005.03.07</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>	
<b>1046</b>	Kegiatan Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1.500.000.000,-
<b>1049</b>	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	81.764.024.000,-
<b>6243</b>	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	49.147.004.000,-
<b>6627</b>	Kegiatan Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5.213.691.000,-
<b>6628</b>	Kegiatan Dukungan Manajemen Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata	1.000.000,-
<b>6629</b>	Kegiatan Dukungan Manajemen Pranta dan Tatalaksana Perkara Pidana	1.000.000,-
<b>6630</b>	Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	2.820.839.000

Tabel 28. Rincian Alokasi Anggaran pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran dengan rincian pagu dan realisasi untuk setiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	49,147,004,000	48,904,495,820	99.51
2	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	6,713,691,000	6,696,817,666	99.75
3	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2,820,839,000	2,816,905,546	99.86
4	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	1,000,000	-	0
5	Direktorat Pranta dan Tatalaksana Perkara Pidana	1,000,000	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>58,683,534,000</b>	<b>58,418,219,032</b>	<b>99.55</b>

*Tabel 29. Perbandingan Presentase Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022*

Dari tabel 26 di atas, kegiatan implementasi berkas perkara pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata dan kegiatan implementasi berkas perkara pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana tidak dilaksanakan karena dikarenakan kebutuhan kegiatan tersebut sudah dapat diakomodir oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung sehingga realisasi anggaran pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata tahun 2022 tidak ada atau sebesar 0%.

Realisasi Belanja Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2022 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp. 58.620.320.603 atau 99,55%. Pagu anggaran tahun 2022 dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 3,43% yaitu Rp.135.789.782.000,- (tahun 2021) naik menjadi Rp. 140.447.558.000,- (tahun 2022).

## **BAB IV PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengalami peningkatan setiap tahun meskipun ada capaian indikator yang menurun namun berdasarkan target yang ditetapkan capaian indikatornya meningkat.

Upaya peningkatan kinerja dengan melakukan pengembangan sistem dalam pelayanan modern yang merupakan respon dari kemajuan teknologi untuk memudahkan masyarakat atau pengguna pengadilan dalam memperoleh layanan yang bermutu. Melalui penggunaan kemajuan teknologi pada setiap pengadilan diharapkan dapat memberikan pelayanan modern, cepat dan mudah bagi masyarakat pengguna pengadilan.

Keberhasilan yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat dilihat dari pencapaian target kinerja yang diperjanjikan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Capaian Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan pada tahun 2022 sebesar 102%, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 151% mengalami Penurunan sebesar 49% dari tahun sebelumnya;
2. Capaian Jumlah tenaga teknis yang promosi dan mutasi pada tahun 2022 sebesar 123%, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 183% mengalami penurunan sebesar 50% dari tahun sebelumnya;
3. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti implementasi standar pemberkasan perkara perdata kasasi dan peninjauan kembali tidak tercapai karena kegiatan tidak terlaksana;
4. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara pidana kasasi, peninjauan kembali dan grasi tidak tercapai karena kegiatan tidak terlaksana;
5. Capaian Jumlah kebijakan yang disusun pada tahun 2022 sebesar 167%, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 160 mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun sebelumnya;

6. Capaian Jumlah tenaga teknis peradilan umum yang kompeten di bidang administrasi peradilan pada tahun 2022 sebesar 104%, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 1870% mengalami menurun sebesar 1766% dari tahun sebelumnya;
7. Capaian Persentase layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan pada tahun 2022 sebesar 121%, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 100% meningkat sebesar 21% dari tahun sebelumnya;
8. Capaian Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2022 sebesar 23%, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 44% mengalami penurunan sebesar 21% dari tahun sebelumnya;
9. Capaian Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada tahun 2022 sebesar 104%, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 53% mengalami peningkatan sebesar 51% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
10. Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 102%, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena target yang digunakan sebagai pengukuran adalah jumlah.
11. Jumlah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya capaian tahun 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 100%.

Pagu Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 135.789.782.000 dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 138.938.623.000,- turun sebesar 2,26 %, dengan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.137.759.308,647,- (seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) atau (98.09%) dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu pusat Tahun 2022 adalah sebesar Rp 58.431.664.237,- (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan realisasi daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 79.327.644.410,- (tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau 98.09%.

- Pagu Satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 81.561.496.000,- (delapan puluh satu milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.182.444.873,- (Tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah atau 97.26% (87%).



**SURAT KEPUTASAN**  
**TIM LAPORAN PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN DAN LAPORAN KINERJA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**Tahun 2022**



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2451/DJU/SK/OT01.3/11/2022

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kinerja Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 perlu membentuk Tim.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  - 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :  
MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan Umum.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM.
- PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan  
Kinerja Tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan bertugas menyusun Laporan Pelaksanaan  
Kegiatan dan Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan mengumpulkan data  
dan analisis yang dibutuhkan serta menyusun target rencana kinerja tahun  
2024 berdasarkan TOR dan RAB yang telah disusun oleh masing-masing  
unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 8 November 2022

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM**



**H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H**

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
3. Arsip.

Lampiran I  
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 2451/DJU/SK/OT01.3/11/2022  
Tanggal : 8 November 2022

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

1. Data dan Narasi :  
tentang  
A. Pendahuluan  
B. Kebijakan Umum  
C. Visi dan Misi  
D. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
E. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi

Koordinator : Drs. Wahyudin, M.Si  
Anggota : 1. Roslina Napitupulu, SH., MH  
2. Kurnia Arry Soelaksono, SH., M.Hum  
3. Sukatno, SH  
4. Krisna Sofiadi, SH  
5. Fardi Faisal SE  
6. Edwin Ruliawan, SH., MH  
7. Nopinus Andreas Purba, SE  
8. Puji Mulyani, S.E  
9. Indra Kurniawan, SE., MM  
10. Suwarni, SH  
11. Arif Hidayat, S.Kom  
12. Ivonne Sari Indah, S.Si  
13. Riswan Haryo Yudianto, S.Kom  
14. Norcha Satria Adi N, S.H  
15. Frisca Viradiba, S.Psi  
16. Indah Palupi Cipto Murti, S.Psi

2. Data dan Narasi :  
tentang  
A. Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Peradilan Umum  
B. Pengawasan Internal dan Evaluasi

Koordinator : Lucas Prakoso, SH., M.Hum  
Anggota : 1. Herti Setiawati, RR., SE., M.Hum  
2. Junaedi Kamaludin, SE., M.Si  
3. Romi Permana, SH., MH  
4. Saenal Akbar, S.H., M.H  
5. Septin Sri Noni, SE  
6. Ade Supriatna, SH., MH  
7. Ade Soniawati, SH., MH

3. Data dan Narasi :  
tentang  
1. Keadaan Perkara  
2. Regulasi Tahun 2022

Koordinator : Zahlisa Vitalita, SH  
Anggota : 1. Lies Khadijah, SH., MH  
2. Candra, SH  
3. Budi Setioko, S.H., M.H  
4. Achmad Basyari, SE  
5. Aris Priyanto, ST  
6. Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom  
7. Oktaviandi Wahyu Nugroho, S.T  
8. Dodon Angin Wiyono, S.Kom

Lampiran II  
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 2451/DJU/SK/OT01.3/11/2022  
Tanggal : 8 November 2022

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**I. PENGUKURAN DAN ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum

Indikator kinerja:

- a. Jumlah Pedoman Tenaga Teknis yang disusun
- b. Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan

2. Peningkatan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator kinerja:

Jumlah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Koordinator : Lucas Prakoso, SH., M.Hum

- Anggota :
1. Herti Setiawati, SH., MM
  2. Saenal Akbar, S.H., M.H
  3. Krisna Sofiadi, SH
  4. Suwarni, SH
  5. Fardi Faisal, SE
  6. Aris Priyanto, ST
  7. Arif Hidayat, S.Kom
  8. Ivonne Sari Indah, S.Si
  9. Riswan Haryo Yudianto, S.Kom
  10. Norcha Satria Adi Nugroho, S.H
  11. Indah Palupi Cipto Murti, S.Psi

**II. PENGUKURAN DAN ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator kinerja:

- a. Jumlah Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum
- b. Presentase Layanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan
- c. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan
- d. Presentase Perkara peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- e. Presentase Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tepat Waktu

Koordinator : Zahlisa Vitalita, SH.,M.H

- Anggota :
1. Roslina Napitupulu, SH., MH
  2. Kurnia Arry Soelaksono, SE., SH., M.Hum
  3. Sukatno, SH
  4. Lies Khadijah, SH., MH
  5. Candra, SH
  6. Budi Setioko, S.H., M.H
  7. Edwin Ruliawan, SH., MH
  8. Nopinus Andreas Purba, SE
  9. Frisca Viradiba, S.Psi

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM

  
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



# RENCANA KINERJA TAHUN 2022

---

DIREKTORAT JENDERAL BADAN  
PERADILAN UMUM



**Rencana Kinerja Tahunan  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Tahun 2022**

Rencana Kinerja Tahunan dituangkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok, fungsi dan wewenang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

***“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”***

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum.

Capaian sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 tertuang dalam lampiran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Pedoman Tenaga Teknis yang disusun b. Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Pembinaan Teknis c. Jumlah tenaga teknis yang promosi dan mutasi	1 dokumen 355 org 1550 org
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti Standar Pemberkasan Perakra Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	5 lokasi
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti Standar Pemberkasan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	5 lokasi
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	8 dokumen
5.		b. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang kompeten dibidang administrasi Peradilan Umum c. Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	215 orang 111.368 Jam layanan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		d. Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	4.648 Perkara
		e. Presentase Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	100%
		f. Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	118 Perkara
6.	Peningkatan Manajemen Pelayanan di lingkungan peradilan umum	Jumlah dokumen tata kelola internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	3 Dokumen

Jakarta, Februari 2021

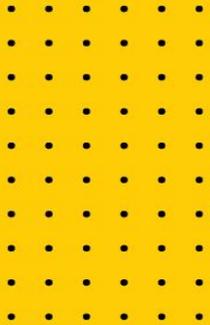
Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum



DR. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H

MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Umum



**Perjanjian Kinerja Tahunan  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dituangkan berdasarkan Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

***“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”***

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum;
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2022 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022



**Perjanjian Kinerja Tahunan  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen dan kesepakatan antara Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Para Pejabat Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dituangkan berdasarkan Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

***“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”***

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum;
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2022 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2022

Sekretaris  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Pertama

Prof. Dr. H. HASBI HASAN, S.H., M.H.

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	<p>a. Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Pembinaan dan bimbingan teknis</p> <p>b. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi</p>	769 orang
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	<p>a. Jumlah Pengadil yang telah mengikuti standar Pemberkas perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali</p> <p>b. Presentase Berkas Perkara Perdata yang lengkap</p>	1.665 orang 5 Pengadil
		- Kasasi	100%
		- Peninjauan Kembali	100%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	<p>a. Jumlah Pengadil yang telah mengikuti standar Pemberkas perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi</p> <p>b. Presentase Berkas Perkara Pidana yang Lengkap</p>	5 Pengadil
		- Kasasi	100%

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		- Peningjuan Kembali	100%
		- Grasi	100%
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun	3 Dokumen
		b. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum	56 orang
		c. Jumlah Masyarakat tidak mampu yang mendapat layanan di Posbakum	43.739 orang
		d. Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	4.628 Perkara
		e. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	160 Perkara
		f. Jumlah perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	130.670 Perkara

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di lingkungan Ditjen Badilum	Jumlah Dokumen Tata kelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	9 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 7.214.036.000,-
2.	Dukungan Manajemen Perdata	Rp. 10.000.000,-
3.	Dukungan Manajemen Pidana	Rp. 50.000.000,-
4.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 3.484.350.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 48.127.676.000,-

Sekretaris  
Mahkamah Agung RI



Prof. Dr. H. HASBIHASAN, S.H., M.H

Jakarta, 4 Januari 2022  
Plt. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



Dr. PRIMHARYADI, S.H., M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Wahyudin, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2022

Plt. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Kedua

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'V' shape followed by several horizontal strokes.

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Pertama

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke followed by a loop and a short horizontal stroke.

Drs. WAHYUDIN, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	9 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 44.223.580.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 792.000.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 792.295.000,-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 2.319.800.000,-

Plt. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



Jakarta, 4 Januari 2022

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan Umum



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

DRS. WAHYUDIN, M.Si.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Lucas Pracoso, S.H., M.Hum.,

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2022

Plt. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Kedua

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Direktur  
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum  
Pihak Pertama

Dr. LUCAS PRAKOSO, S.H., M.Hum.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIK PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pembinaan dan bimbingan teknis b. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	729 Orang 1.665 Orang

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Rp. 1.500.000.000,-
2.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 5.714.036.000,-

Jakarta, 4 Januari 2022

Plt. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Direktur

Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum



Dr. LUCAS PRACOSO, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.  
Jabatan : Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2022

Plt. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Kedua

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Direktur Pembinaan Administrasi  
Peradilan Umum  
Pihak Pertama

ZAHLISA VITALITA, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun  b. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum	3 Dokumen  56 Orang
		c. Jumlah Masyarakat tidak Mampu yang mendapat layanan di Posbakum	43.739 Orang
		d. Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	4.628 Perkara
		e. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	160 Perkara
		f. Jumlah perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	130.670 Perkara

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Rp. 299.870.000,-
2.	Layanan Manajemen SDM Internal (Peningkatan Kompetensi Administrasi Peradilan)	Rp. 944.460.000,-

No.	Kegiatan	Anggaran
3.	Koordinasi	Rp. 2.026.890.000,-
4.	Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Yustisial Tk Banding ke Tk. Pertama	Rp. 2.419.835.000,-
5.	Sosialisasi dan Diseminasi	Rp. 4.432.000.000,-
6.	Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 55.122.326.000,-
7.	Sidang diluar Gedung pengadilan	Rp. 6.317.295.000,-
8.	Pengguna Layanan Bantuan Hukum	Rp. 11.136.800.000,-
9.	Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 106.350.000,-

Jakarta, 4 Januari 2022

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



Dr. PRIMHARYADI, S.H., M.H.

Direktur  
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum



ZAHLISA VITALITA, S.H., M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Wahyudin, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2022

Plh. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Kedua

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Sekretaris  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku Plt. Direktur  
Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata

Drs. WAHYUDIN, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTUR PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PERDATA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali b. Presentase Berkas Perkara Perdata yang lengkap - Kasasi - Peninjauan Kembali	5 Pengadilan  100% 100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Monitoring dan Evaluasi Pemberkasan Perdata)	Rp. 10.000.000,-

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Jakarta, 4 Januari 2022

Sekretaris  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku Plt. Direktur  
Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata



Drs. WAHYUDIN, M.Si

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Wahyudin, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2022

Plh. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Kedua

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'V' shape followed by a cursive name.

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Sekretaris  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku Plt. Direktur  
Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke followed by a cursive name.

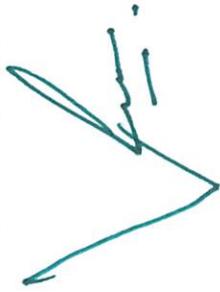
Drs. WAHYUDIN, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTUR PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PIDANA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi b. Presentase Berkas Perkara Pidana yang Lengkap	5 Pengadilan
		- Kasasi	100%
		- Peninjauan Kembali	100%
		- Grasi	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	
		Rp.	
1.	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Monitoring dan Evaluasi Pemberkasan Pidana)	Rp.	50.000.000,-

Plt. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



Dr. PRIMHARYADI, S.H., M.H..

Jakarta, 4 Januari 2022

Sekretaris

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku Plt. Direktur  
Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana



Drs. WAHYUDIN, M.Si



**Perjanjian Kinerja Tahunan  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dituangkan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

***“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”***

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2022 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022



**Perjanjian Kinerja Tahunan  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen dan kesepakatan antara Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Para Pejabat Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dituangkan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

***“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”***

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2022 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Bambang Myanto, S.H.,M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Hasbi Hasan., M.H

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2022

Sekretaris  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Pertama

Prof. Dr. H. HASBI HASAN, M.H

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Pembinaan dan bimbingan teknis b. Jumlah Tenaga Teknis yang promosi dan mutasi	901 Orang 1.695 orang
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali b. Presentase Berkas Perkara Perdata Lengkap	5 Pengadilan 100 % 100 %
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi b. Presentase Berkas Perkara Pidana yang Lengkap	5 Pengadilan 100 % 100 % 100 %

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun	3 Dokumen
		b. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum	56 Orang
		c. Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum	43.739 Orang
		d. Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	4.628 Perkara
		e. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	160 Perkara
		f. Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	130.670 perkara
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum	Jumlah dokumen tata kelola Internal di Lingkungan Ditjen Badilum	9 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 6.713.691.000,-
2.	Dukungan Manajemen Peradata	Rp. 10.000.000,00
3.	Dukungan Manajemen Pidana	Rp. 50.000.000,00

No.	Kegiatan	Anggaran
4.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 2.872.630.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 49.239.741.000,-

Sekretaris  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

Jakarta Juni 2022  
Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Pertama



Prof. Dr. H. HASBI HASAN, M.H



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Wahyudin, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2022

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Pihak Pertama

DRS. WAHYUDIN, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	9 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 45.794.612.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 970.000.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 589.792.000,-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 1.885.337.000,-

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jakarta, Juni 2022  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Badan Peradilan Umum



DRS. WAHYUDIN, M.Si.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2022

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

Direktur  
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Dr. LUCAS PRAKOSO, S.H., M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Pembinaan dan bimbingan teknis b. Jumlah Tenaga Teknis yang promosi dan mutasi	901 Orang 1.695 Orang

No.	Kegiatan	Anggaran	
1.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Rp.	1.500.000.000,-
2.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	5.213.691.000,-

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

Jakarta, Juni 2022

Direktur

Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum



Dr. LUCAS PRAKOSO, S.H., M.Hum

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita, S.H., M.H  
Jabatan : Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2022

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum

Direktur Pembinaan Administrasi  
Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

ZAHLISA VITALITA, S.H., M.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun	3 Dokumen
		b. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum	56 Orang
		c. Jumlah Masyarakat tidak Mampu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum	43.739 Orang
		d. Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	4.628 Perkara
		e. Jumlah Perkara diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	160 Perkara
		f. Jumlah Perkara ditingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	130.670 perkara

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Rp. 202.528.000,-
2.	Layanan Manajemen SDM Internal (Peningkatan Kompetensi Administrasi Peradilan)	Rp. 2.670.102.000,-

No.	Kegiatan	Anggaran
3.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 4.446.725.000,-
4.	Sosialisasi dan Diseminasi	Rp. 4.432.000.000,-
5.	Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 55.122.326.000,-
6.	Sidang diluar Gedung pengadilan	Rp. 6.317.295.000,-
7.	Pengguna Layanan Bantuan Hukum	Rp. 11.136.800.000,-
8.	Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 106.350.3000,-

Jakarta, Juni 2022

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum

Direktur  
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H



ZAHLISA VITALITA, S.H., M.H

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Wahyudin, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2022

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum

A large, stylized blue ink signature of H. Bambang Myanto, S.H., M.H. is written over the name.

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

Sekretaris  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku Plt. Direktur  
Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata

A blue ink signature of Drs. Wahyudin, M.Si. is written over the name.

DRS. WAHYUDIN, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTUR PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PERDATA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi dan Peninjauan Kembali b. Presentase Berkas Perkara Peradata yang lengkap	5 Pengadilan
		- Kasasi	100 %
		- Peninjauan Kembali	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Monitoring dan Evaluasi Pemberkasan perdata)	Rp. 10.000.000,00

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jakarta, Juni 2022

Sekretaris  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku Plt. Direktur  
Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata



DRS. WAHYUDIN, M.Si.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Wahyudin, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Bambang Myanto, S.H., M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2022

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

Sekretaris  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku Plt. Direktur  
Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana

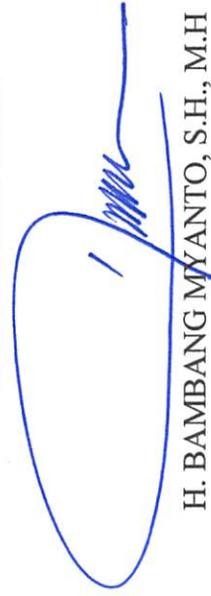
DRS. WAHYUDIN, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTUR PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PIDANA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi Peninjauan Kembali dan Grasi	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Perdata Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi b. Presentase Berkas Perkara Pidana yang lengkap	5 Pengadilan
		- Kasasi	100 %
		- Peninjauan Kembali	100 %
		- Grasi	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran	
1.	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Monitoring dan Evaluasi Pemberkasan Pidana)	Rp.	50.000.000,00

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jakarta, Juni 2022

Sekretaris  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku Plt. Direktur  
Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana



DRS. WAHYUDIN, M.Si.

